

LAPORAN TAHUNAN PPID

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) INDRAPURI
TAHUN 2018**



**BPTU-HPT INDRAPURI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Indrapuri.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi sampai dengan Desember 2018.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Indrapuri, Januari 2019

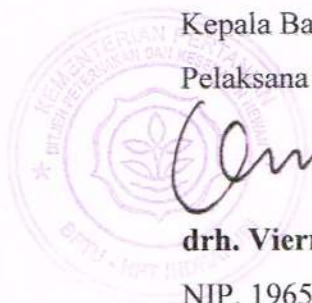
Kepala Balai selaku Pembina PPID

Pelaksana BPTU-HPT Indrapuri



drh. Vierman

NIP. 19651220 199203 1 003



LAPORAN TAHUNAN PPID
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK (BPTU-HPT) INDRAPURI TAHUN 2018

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

– Kebijakan Layanan Informasi Publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT)

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UUKIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri (BPTU-HPT) salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan ternak bibit Sapi Aceh. BPTU-HPT Indrapuri menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara

oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UUKIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU-HPT Indrapuri sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPTU-HPT Indrapuri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 24005/KP.340/F2.A/01/2018 tentang Pembentukan Unit Kerja

Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 09005/KP.340/F2.A/01/2018 tentang Tim Pengelola Website pada BPTU-HPT Indrapuri Tahun 2018.

Pengelolaan PPID dilingkungan BPTU-HPT Indrapuri meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BPTU-HPT Indrapuri (<http://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id/>). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BPTU - HPT Indrapuri.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik, BPTU-HPT Indrapuri Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan oleh Kepala BPTU-HPT Indrapuri. Selain mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai panduan untuk melaksanakan tugas tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Balai dengan Nomor: 10002/HM.100/F2.A/10/2016.

II. Motto dan Maklumat

Motto : “Sapi Aceh Unggul berkualitas, Peternak Makmur dan Cerdas”

Maklumat Pelayanan : “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah

ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak dilanjutkan sesuai peraturan perundangan
“

III. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

a. Sarana Prasarana Informasi Publik yang dimiliki serta Kondisinya

Berkaitan dengan sarana prasarana, PPID BPTU-HPT Indrapuri menggunakan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan meja, kotak saran, sarana untuk charge HP dan *Wifi* gratis. Dalam memberikan layanan, PPID BPTU - HPT Indrapuri dapat menerima pemohon informasi publik secara langsung di ruang tamu dan diajak di ruang pelayanan.

Layanan permohonan informasi publik yg diajukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID BPTU-HPT Indrapuri diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing seksi terkait untuk selanjutnya ditanggapi seksi tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.



Gambar 1. Desk Layanan BPTU - HPT Indrapuri



Gambar 2. Ruang Tunggu/Ruang Tamu BPTU - HPT Indrapuri

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan

informasi secara efektif dan efisien, tersedia aplikasi *online* Silayan yaitu portal PPID yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan tersedian diwebsite BPTU-HPT Indrapuri <http://bptu-hptindrapuri.ditjennak.ppid.pertanian.go.id>. Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi BPTU-HPT Indrapuri secara langsung dapat dilayani melalui telephone dan whatsapp. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 09.00 sd 16.00 WIB (Senin s/d Kamis) dan 09.00 s/d16.30 WIB (Jumat).

b. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong BPTU - HPT Indrapuri untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website. Melalui website BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UUKIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan. BPTU-HPT Indrapuri menyediakan pelayanan masyarakat untuk penjualan ternak bibit Sapi Aceh Unggul, Penjualan Hijauan Pakan Ternak, Bimbingan Teknis, Wisata Pendidikan dan Lainnya (Penelitian Narasumber)

c. Sumber Daya Manusia

BPTU-HPT Indrapuri Telah menempatkan 1 orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor: 03002/HM.130/F.2.I/10/2016 tentang

Penetapan Manajer Dan Petugas Pelayanan Publik Pada Jenis Pelayanan Kegiatan BPTU - HPT Indrapuri Tahun 2018 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing.

d. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul Indrapuri Nomor: SP DIPA-018.06.2.239413/2018. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, Banner), yaitu:

Leaflet:

- Alur Layanan
- Skema breeding program

Banner:

Hak Pemohon Informasi Publik

- Kawasan Zona Integritas, PPID, Antikorupsi, Jaminan Keamanan
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik

IV. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BPTU-HPT Indrapuri adalah sebagai berikut:

- Belum dikelolanya informasi publik secara baik (terdapat aplikasi untuk pemohon informasi publik secara online melalui website, namun petugas belum memanfaatkan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan

petugas yg mengerti aplikasi dari SILAYAN), materi yang disediakan di website adalah formulir permintaan informasi publik dalam bentuk pdf.

- Perlu ditingkatkannya koordinasi antar seksi dalam memberikan jawaban informasi.

V. Sarana yang Diusulkan

- Meningkatkan keterampilan SDM terkait aplikasi SILAYAN
- Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

Demikian laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) ini disampaikan, kami tetap berkomitmen akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik dari semua unsur pelayanan.